



DINKES PEROLEH TAMBAHAN TERBANYAK

APBD Perubahan Fokus Masalah Kesehatan dan Sosial

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berhasil menyampaikan nota keuangan rancangan APBD perubahan 2021. Dalam perubahan anggaran tersebut, sektor kesehatan dan sosial menjadi aspek yang paling krusial dibahas bersama dewan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut secara keseluruhan APBD mumi 2021 sebenarnya sudah merespons kondisi Covid-19. Akan tetapi pada Juli terjadi lonjakan kasus akibat varian Delta yang belum diprediksi sebelumnya. "Akibatnya kan asumsi pendapatan baik sektor pajak, retribusi maupun transfer dari pusat yang menurun. Namun di sisi lain kita harus meningkatkan belanja untuk melakukan intervensi di masyarakat. Ini yang coba kita antisipasi melalui perubahan anggaran," urainya usai menyerahkan nota keuangan rancangan APBD perubahan 2021 di gedung dewan, Senin (23/8).

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja tersebut akhirnya mampu diimbangi melalui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2020. Prediksi silpa yang sudah dialokasikan dalam APBD

2021 sebelumnya mencapai Rp 134,4 miliar. Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diputuskan Rp 382,9 miliar. Dengan begitu terdapat Rp 248,4 miliar yang bisa ditambahkan melalui APBD perubahan tahun ini.

Dari nota rancangan APBD perubahan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) mendapat tambahan anggaran yang paling besar dibanding organisasi perangkat daerah lainnya. Tambahan anggaran untuk Dinkes melalui APBD perubahan mencapai Rp 103,6 miliar. Sehingga total belanjanya menjadi Rp 484,1 miliar dari sebelumnya Rp 380,5 miliar. "Kita tetap fokus pada urusan kesehatan untuk belanja. Misalnya membangun generator oksigen yang lebih besar di RSUD, sehingga jangka panjangnya bisa memenuhi kebutuhan oksigen di masa yang akan datang," imbuh Heroe.

Selain itu percepatan vaksinasi tidak kalah penting dalam menjamin kesehatan masyarakat. Pengalaman pada lonjakan kasus Juli lalu, warga yang telah divaksin memiliki tingkat keparahan yang lebih ringan. Seluruh warga kota pun harus secepatnya divaksin. Namun percepatan vaksinasi membutuhkan dukungan perangkat seperti tempat, mobil vaksin, tenaga medis, fasilitas skrining dan perangkat lainnya.

Sementara masalah sosial ekonomi turut menjadi perhatian untuk dipertajam melalui perubahan anggaran. Sehingga intervensi sosial diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Dicontohkannya bantuan permakanan bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri. Jika sebelumnya alokasi Rp 1 miliar bisa digunakan hingga beberapa bulan, namun pada Juli lalu sudah ludes dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Dengan begitu selain penambahan anggaran juga perlu penguatan petugas administrasi agar setiap tagihan bisa segera terbayarkan. Bantuan permakanan tersebut

melibatkan kelompok kuliner di wilayah yang tergabung dalam program Gandeng Gendong supaya perputaran uang berdampak langsung bagi roda ekonomi masyarakat.

Heroe menambahkan, pemberian stimulus bagi bangkitnya ekonomi juga ditingkatkan. Terutama bantuan sosial secara langsung atau tidak langsung bagi masyarakat yang terdampak maupun rentan miskin. Khususnya warga yang sama sekali belum tersentuh program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat sehingga perlu diakomodir melalui APBD. "Kita sudah petakan kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun mereka ini rentan miskin. Mereka pun perlu intervensi agar tidak masuk menjadi miskin," tandasnya seraya mengatakan total bantuan sosial di APBD 2021 mencapai Rp 44,1 miliar.

Akan tetapi, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah antisipasi usai PPKM. Terutama ketika tempat wisata

sudah kembali dibuka dan mobilitas masyarakat meningkat. Pasalnya, pengalaman tahun lalu lonjakan kasus Covid-19 selalu terjadi ketika mobilitas masyarakat tinggi. Oleh karena itu perlu ada gerakan melalui promosi kesehatan agar kondisi tersebut tidak kembali terulang. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki ketahanan agar saat mobilitas kembali tinggi namun kesehatan tetap terjaga.

Salah satu upaya yang akan dikembangkan ialah 'one gate systems' bagi bus pariwisata yang akan masuk Yogya. Seluruh bus pariwisata yang membawa wisatawan wajib masuk Terminal Giwangan untuk proses skrining. Terutama pemeriksaan identitas kesehatan serta kartu vaksin. Bagi yang lolos, akan mendapatkan surat khusus dan diarahkan rute menuju tempat parkir. Sebaliknya, bagi yang tidak lolos akan dilarang masuk Kota Yogya.

"Upaya kita untuk menjamin wisatawan yang datang itu benar-benar sehat. Ini harus dipahami bersama dan muncul kebiasaan atau gerakan di masyarakat," katanya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005